

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Dedi Soemardi. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ind-Hill-Co. Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Iriyanto A. Baso Ence. 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni. Bandung.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.
- , 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2000. *Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I*. Buku Kedua jilid 3 C. Jakarta.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publishing. Bekasi.

- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soimun & Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Titi Anggraini *et al.* 2014. *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*. Yayasan Perludem. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Artikel Jurnal

- Eko Supriyanto. Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang. *Yuridika*, Volume 31 No 3. Tahun 2016.
- Fadzlun Budi Sulisty Nugroho. Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*. Volume 2 No. 2. Tahun 2019.
- Syihabudin. Kajian terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 23. Tahun 2003.

Undang-Undang dan Peraturan Sejenis

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor /PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.

Makalah

Janedjri M. Gaffar. 2009. "Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Makalah. Mahkamah Konstitusi. Surakarta.

Kamus dan Ensiklopedia

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Jakarta.

Henry Campbell Black. 1968. Black's Law Dictionary. Fourth Edition. West Publishing Co. St Paul, Minn.

Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2017.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Himpunan Risalah Sidang-Sidang.

Artikel Internet

<https://www.lsi.or.id/post/laporan-rilis-survei-pasca-pileg-dan-pilpres-2014>.
Diakses pada Selasa, 1 Februari 2022.